

BAB 2

GAMBARAN UMUM

2.1 Profil Geografis dan Administrasi Kawasan Pesisir Utara Kota Semarang

Kawasan pesisir utara Kota Semarang secara administratif mencakup beberapa kecamatan strategis yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Fokus utama dalam penelitian ini diarahkan pada Kecamatan Semarang Utara dan Kecamatan Tugu, di mana fenomena krisis pesisir mencapai titik paling kritis sekaligus menjadi lokus pengambilan data lapangan. Wilayah ini secara keseluruhan dicirikan oleh topografi dataran rendah aluvial yang terbentuk dari proses sedimentasi muara sungai selama berabad-abad, menjadikannya wilayah yang sangat dinamis namun rentan secara geofisika.

Kelurahan Tanjung Mas merupakan salah satu wilayah terpenting dalam struktur ekonomi Kota Semarang karena keberadaan Pelabuhan Tanjung Mas yang berskala internasional. Kelurahan ini memiliki luas wilayah mencapai 323,78 hektare, yang secara geografis berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sisi utara. Di dalam kelurahan ini terdapat dua kawasan permukiman nelayan yang menjadi pusat perhatian dalam studi bencana pesisir sekaligus lokus penelitian ini, yaitu Tambaklorok dan Tambakrejo.

Kawasan Tambaklorok memiliki profil yang sangat spesifik. Dengan total luas kawasan sekitar 46,8 hektare, wilayah ini berada pada ketinggian rata-rata hanya 0,5 meter di atas permukaan laut (mdpl). Posisi yang sangat rendah ini menjadikan Tambaklorok sangat rentan terhadap kenaikan muka air laut. Batas-batas wilayah Tambaklorok meliputi Laut Jawa di utara, Jalan Arteri Utara di selatan, Pembangkit Listrik Tenaga Uap dan Gas (PLTUG) di barat, dan Kali Banger di timur. Wilayah ini didominasi oleh penggunaan lahan permukiman (32,4 Ha) dan sisa-sisa kolam atau tambak (11,2 Ha) yang kini banyak terendam secara permanen akibat rob. Karakteristik tanah di Tambaklorok yang terdiri dari endapan aluvial muda menyebabkan laju penurunan tanah di kawasan ini menjadi salah satu yang tertinggi, berkisar antara 9-10 cm per tahun.

Berdekatan dengan Tambaklorok, Kampung Tambakrejo merupakan permukiman nelayan yang menjadi salah satu lokus utama penelitian ini. Secara historis, komunitas nelayan Tambakrejo sebelumnya bermukim di sekitar bantaran sungai menuju muara di pesisir utara, namun pada tahun 2019 mengalami penggusuran atas dalih normalisasi. Sebagian warga, yaitu 97 kepala keluarga dari total 164 kepala keluarga, menolak relokasi ke Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Kudu karena lokasinya yang berjauhan dari laut dan tidak sesuai dengan mata pencaharian mereka sebagai nelayan. Setelah proses mediasi, warga yang bertahan kemudian ditempatkan di hunian sementara (Huntara) yang dibangun di atas lahan yang status pengelolaannya berada di bawah Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Status lahan yang bukan milik warga ini menempatkan komunitas Tambakrejo dalam posisi rentan secara hukum, karena sewaktu-waktu berpotensi kembali digusur. Kondisi inilah yang menjadikan Tambakrejo sebagai lokasi penting untuk memahami dinamika advokasi WALHI Jawa Tengah, sebagaimana dibahas pada Bab 3.

Kelurahan Bandarharjo, yang juga terletak di Kecamatan Semarang Utara, memiliki luas wilayah yang paling dominan di kecamatan tersebut, yaitu 342,68 hektare atau mencakup sekitar 30,1% dari total luas kecamatan. Bandarharjo berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Mas di sebelah timur dan Laut Jawa di utara. Seluruh wilayah Bandarharjo berada di dataran rendah yang terdiri dari kawasan tepi pantai, aliran sungai, dan bantaran sungai. Transformasi tata guna lahan di Bandarharjo memperlihatkan pergeseran dari ekosistem alami menuju kawasan industri dan permukiman padat. Lahan yang dulunya berfungsi sebagai rawa, sawah, dan tambak yang secara alami berperan sebagai daerah retensi air laut kini telah banyak direklamasi, sehingga memperparah risiko banjir rob akibat hilangnya daya tampung air alami. Secara administratif, kelurahan ini terbagi menjadi 12 RW dan 103 RT, yang mencerminkan kepadatan permukiman di wilayah pesisir ini. Bandarharjo dalam penelitian ini berfungsi sebagai pembanding kontekstual yang memperlihatkan variasi pola kerentanan, yaitu pergeseran dari basis ekonomi perikanan menuju basis ekonomi buruh industri.

Berada di sisi barat Kota Semarang, Kelurahan Mangkang Wetan di Kecamatan Tugu menawarkan perspektif yang berbeda namun tetap berada dalam lingkup krisis yang serupa, sekaligus menjadi lokus penelitian melalui komunitas pegiat mangrove di wilayah Mangunharjo yang berbatasan langsung dengannya. Kelurahan ini memiliki luas wilayah sekitar 346,51 hektare. Berada pada koordinat 6°57'41.40"S dan 110°19'5.01"T, Mangkang Wetan memiliki topografi dengan ketinggian antara 0 hingga 8 mdpl. Wilayah ini dicirikan oleh kemiringan lereng yang sangat landai, berkisar antara 0% hingga 2%, sehingga aliran air permukaan menjadi sangat lambat dan rawan tergenang saat air laut pasang atau saat debit air sungai dari hulu meningkat. Mangkang Wetan berbatasan dengan Kelurahan Mangunharjo di barat dan Laut Jawa di utara. Meskipun masih memiliki area tambak yang cukup luas, krisis rob telah menyebabkan produktivitas tambak menurun drastis karena seringnya genangan air laut yang merusak ekosistem budidaya ikan dan udang.

Tabel 2 2.1 Data Geografis Wilayah Pesisir Utara Kota Semarang

Kelurahan/Kawasan	Luas Wilayah (Ha)	Elevasi Rata-rata (mdpl)	Batas Utara
Tanjung Mas	323,78	0,5 – 1	Laut Jawa
Bandarharjo	342,68	< 1	Laut Jawa
Mangkang Wetan	346,51	0 – 8	Laut Jawa
Tambaklorok*	46,80	0,5	Laut Jawa

Keterangan: Tambaklorok merupakan kawasan permukiman yang secara administratif berada dalam Kelurahan Tanjung Mas.

Sumber: diolah peneliti dari [BPS Kota Semarang tahun 2025]

2.2 Dinamika Demografi dan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Terdampak

Kondisi kependudukan di pesisir utara Semarang menunjukkan pola kepadatan yang tinggi dengan ketergantungan ekonomi yang besar pada sumber daya pesisir. Namun, seiring memburuknya krisis ekologis, struktur sosial ekonomi masyarakat di wilayah ini mengalami tekanan yang signifikan.

Dalam konteks populasi dan kepadatan penduduk, Kecamatan Semarang Utara merupakan salah satu wilayah terpadat di Kota Semarang. Kelurahan Bandarharjo memiliki jumlah penduduk yang sangat tinggi, mencapai 22.914 jiwa pada tahun 2021, dengan komposisi yang relatif seimbang antara laki-laki (11.427 jiwa) dan perempuan (11.487 jiwa), serta jumlah kepala keluarga mencapai 7.655 KK. Kawasan Tambaklorok dihuni oleh sekitar 30.678 jiwa pada lahan seluas 46,8 hektare, sehingga menjadikannya salah satu konsentrasi penduduk nelayan terpadat di Kota Semarang. Sementara itu, Kelurahan Mangkang Wetan memiliki jumlah penduduk 7.043 jiwa berdasarkan data 2019, yang meningkat menjadi 7.110 jiwa pada tahun 2024, dengan kepadatan sekitar 1.652 jiwa/km². Meskipun jumlahnya tidak sebesar Bandarharjo, beban sosial di Mangkang Wetan cukup berat karena tingginya angka kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap infrastruktur mitigasi bencana.

Dalam konteks mata pencaharian dan kerentanan ekonomi, masyarakat di pesisir utara Semarang secara tradisional mengandalkan sektor kelautan dan perikanan. Di Tambaklorok, sekitar 80% penduduk bekerja sebagai nelayan, mencakup nelayan penangkap ikan, nelayan buruh, hingga penyedia jasa sewa perahu. Namun, penurunan hasil tangkapan ikan dan kerusakan alat tangkap akibat banjir rob telah menyebabkan pendapatan nelayan menurun hingga 39% dalam kurun waktu kurang dari satu dekade.

Sementara itu, di Kelurahan Bandarharjo struktur mata pencaharian lebih bergeser ke sektor buruh industri, dengan sekitar 58% penduduk bekerja sebagai buruh industri. Alasan utama masyarakat tetap bertahan di lokasi yang rutin dilanda rob adalah kedekatan tempat tinggal mereka dengan tempat kerja di kawasan industri. Namun kondisi ekonomi mereka yang umumnya tergolong rendah membatasi kemampuan untuk melakukan relokasi mandiri ke daerah yang lebih aman. Adapun di Kelurahan Mangkang Wetan,

lebih dari setengah populasi memiliki penghasilan di bawah Upah Minimum Regional (UMR) Kota Semarang. Rendahnya pendapatan ini berimplikasi pada ketidakmampuan warga untuk merespons ancaman rob secara efektif, misalnya meninggikan lantai rumah secara rutin, dan diperparah oleh hilangnya produktivitas tambak yang merupakan salah satu sumber penghasilan utama warga.

Tabel 3 2.2 Demografi Wilayah Pesisir Utara Kota Semarang

Indikator Demografi	Bandarharjo	Mangkang Wetan	Tambaklorok
Jumlah Penduduk	22.914 jiwa	7.110 jiwa	30.678 jiwa
Kepadatan (jiwa/km ²)	Tinggi	1.652	Sangat tinggi
Dominasi Pekerjaan	Buruh Industri (58%)	Nelayan/Petambak	Nelayan (80%)
Kelompok Rentan	Ekonomi rendah	Penghasilan < UMR	970 KK miskin

Sumber: diolah peneliti dari data BPS Kota Semarang tahun 2025

2.3 Gambaran Krisis Ekologis Pesisir Utara Semarang

Krisis ekologis di pesisir utara Kota Semarang tidak dapat dipahami sebagai persoalan tunggal yang berdiri sendiri, melainkan sebagai satu rantai persoalan yang saling berkaitan dan saling mengunci. Koalisi Pesisir Semarang–Demak dalam kajiannya merumuskan empat masalah utama yang saling berhubungan di Kawasan Pesisir Semarang–Demak (KPSD), yaitu eksploitasi air tanah, amblesan tanah (*land subsidence*), banjir dan rob, serta abrasi pantai (Batubara dkk., 2020). Keempat masalah ini tidak terpisah satu sama lain, melainkan membentuk rantai kausalitas yang dapat dijelaskan secara sederhana: ekstraksi air tanah yang berlebihan mendorong terjadinya amblesan tanah; amblesan tanah, terutama di bagian utara Semarang, membuat kawasan tersebut semakin rentan terhadap banjir yang datang dari laut (rob); dan arus laut pada gilirannya

turut menyebabkan abrasi pantai. Kerangka rantai inilah yang digunakan untuk memahami proses sosial-ekologis yang berlangsung di pesisir utara Semarang.

2.3.1 Eksploitasi Air Tanah

Mata rantai pertama dari krisis ini adalah eksploitasi air tanah yang bermula dari kebutuhan yang tidak terhindarkan terhadap air, baik pada skala rumah tangga maupun industri. Sebuah penelitian yang dipublikasikan pada tahun 2013 menyebutkan bahwa dari delapan kawasan industri yang diteliti di Semarang, seluruhnya memanfaatkan air tanah, dengan mayoritas (tujuh kawasan) menggunakan sumur bor (Batubara dkk., 2020). Pengambilan air tanah ini telah berlangsung secara masif dan terus meningkat sejak awal abad ke-20. Tidak hanya industri, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Moedal sebagai penyedia air bagi warga kota pun turut mengandalkan air tanah sebagai salah satu sumbernya, di mana sekitar 18,8% produksi airnya pada tahun 2013 berasal dari air tanah.

Persoalan eksploitasi air tanah ini tidak hanya menyangkut kuantitas, tetapi juga kualitas. Berdasarkan parameter kuantitas (tinggi muka air tanah), kualitas (konduktivitas elektrik), dan amblesan tanah, wilayah Semarang bagian utara dan timur sebagian besar tergolong dalam zona rusak (*damaged*), kritis (*critical*), dan rentan (*vulnerable*). Pengambilan air tanah yang berlebihan inilah yang kemudian menjadi salah satu pemicu utama mata rantai berikutnya, yaitu amblesan tanah.

2.3.2 Amblesan Tanah (Land Subsidence)

Mata rantai kedua adalah amblesan tanah, di mana Kota Semarang tercatat ambles dengan laju yang cepat. Berdasarkan pengukuran pada stasiun pemantauan, di bagian timur ke arah Demak laju penurunan tanah melebihi 10 cm per tahun (Batubara dkk., 2020). Penting dicatat bahwa eksploitasi air tanah bukanlah satu-satunya penyebab amblesan. Para akademisi menempatkan ekstraksi air tanah sebagai salah satu faktor yang berkombinasi dengan penyebab lain, yaitu konsolidasi alami sedimen muda di bagian utara Kota Semarang serta pembebanan oleh bangunan dan konstruksi.

Studi Marsudi (2001, dalam Batubara dkk., 2020) memperlihatkan adanya perbedaan spasial dalam amblesan tanah, di mana semakin ke arah laut atau pantai,

amblesan tanah yang terjadi semakin besar. Studi tersebut membagi kawasan yang ambles menjadi tiga zona berdasarkan dominasi penyebabnya. Pada Zona I, yang meliputi kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, Tambak Lorok, Tanah Mas, dan Marina, beban tanah urug berperan lebih dominan (52–59%) dibandingkan penurunan muka air tanah (41–48%). Pada Zona II, yang meliputi kawasan Tawang dan sekitarnya, peran kedua faktor tersebut hampir setara (sekitar 49–50%). Sementara pada Zona III, yang mencakup kawasan seperti Simpanglima dan Jalan Pemuda, faktor penurunan muka air tanah justru lebih dominan (52–64%). Pembagian zona ini menunjukkan bahwa kawasan permukiman nelayan seperti Tambak Lorok yang menjadi salah satu lokus penelitian ini berada pada zona dengan tingkat amblesan tertinggi.

Dampak amblesan tanah ini tampak secara dramatis pada sejumlah penanda fisik, salah satunya Masjid Layur Semarang, yang pada tahun 1990-an lantai pertamanya masih dapat digunakan, namun kini telah berada di bawah permukaan tanah sehingga hanya menyisakan bagian jendela yang terlihat di permukaan (Batubara dkk., 2020).

2.3.3 Banjir dan Rob

Mata rantai ketiga adalah banjir, di mana amblesan tanah yang terus terjadi membuat Kota Semarang semakin rentan, terutama terhadap banjir yang datang dari laut. Dalam kerangka hidrologis, terdapat tiga jenis banjir di Semarang (Batubara dkk., 2020). Pertama, banjir kiriman yang berasal dari hulu akibat berkurangnya fungsi hidrologis lingkungan, di mana berkurangnya tutupan hutan menurunkan kemampuan lahan untuk menahan dan menyerap air hujan. Kedua, banjir akibat hujan lokal di dalam kota karena berkurangnya daya serap permukaan kota dan terlampauinya kapasitas saluran drainase. Ketiga, banjir rob, yaitu banjir yang terjadi akibat pasang air laut, yang kerap melanda Semarang bagian utara termasuk kawasan seperti Kampung Tambakrejo.

Banjir rob ini merupakan akibat dari kombinasi antara kenaikan muka air laut dan penurunan permukaan tanah. Prediksi saintifik memperkirakan kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim mencapai 15,5 cm hingga tahun 2030, atau setara dengan laju sekitar 0,8–1 cm per tahun, dengan sejumlah estimasi lain yang lebih kecil berkisar antara 5 hingga 7,8 mm per tahun (Batubara dkk., 2020). Apabila dibandingkan, penurunan

permukaan tanah yang di beberapa tempat mencapai atau melebihi 10 cm per tahun memberikan kontribusi yang jauh lebih signifikan terhadap kerentanan banjir rob dibandingkan kenaikan muka air laut itu sendiri. Secara keseluruhan, sebagaimana tercatat dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, pada tahun 2015 luas genangan rob dan banjir di Semarang mencapai 2.600 hektare, dengan lama genangan maksimal sembilan jam dan ketinggian genangan rata-rata 50 cm.

2.3.4 Abrasi Pantai

Mata rantai keempat sekaligus penutup dari rangkaian krisis ini adalah abrasi pantai, yang terjadi terutama di kawasan sebelah timur Kota Semarang hingga Demak. Salah satu contoh paling nyata adalah abrasi di Desa Bedono, Demak, yang dalam kurun sekitar dua dekade terakhir diperkirakan menjadi salah satu abrasi terbesar di Indonesia. Lebih dari 2.000 hektare kawasan pantai telah terabrasi, menyebabkan mundurnya garis pantai sepanjang lebih dari 5 kilometer dibandingkan kondisi pada tahun 1990-an (Batubara dkk., 2020).

Abrasi ini tidak semata-mata disebabkan oleh faktor alam, melainkan juga berkaitan dengan campur tangan pembangunan. Menurut pakar kelautan dari Universitas Diponegoro yang dikutip dalam kajian Koalisi Pesisir Semarang–Demak, keberadaan bangunan yang menjorok ke laut, terutama di kawasan Semarang, menjadi salah satu penyebab yang membuat abrasi di kawasan Demak semakin intens. Kekhawatiran serupa juga muncul terkait rencana pembangunan infrastruktur berskala besar seperti Tol Tanggul Laut Semarang–Demak (TTLSD), yang dinilai berpotensi mengubah arus laut dan justru mempercepat abrasi di kawasan Demak.

2.3.5 Krisis sebagai Persoalan Sosial-Ekologis

Keempat mata rantai di atas menegaskan bahwa krisis di pesisir utara Semarang bukanlah semata persoalan teknis-alamiah, melainkan persoalan sosial-ekologis yang terkait erat dengan model pembangunan. Koalisi Pesisir Semarang–Demak menempatkan krisis ini dalam kerangka krisis sosial-ekologis, yaitu kondisi yang lahir dari pembangunan kapitalistik di mana ruang, manusia, dan elemen non-manusia seperti air

tanah ditarik ke dalam sirkuit akumulasi kapital (Batubara dkk., 2020). Dalam kerangka ini, krisis ekologis dipahami sebagai sisi lain yang tidak terpisahkan dari ekspansi pembangunan yang berorientasi pada kepentingan ekonomi. Kerangka pemahaman inilah yang menjadi konteks penting bagi analisis peran WALHI Jawa Tengah dalam advokasi adaptasi krisis pesisir, sebagaimana dibahas pada Bab 3.

2.4 Peta Kerentanan dan Ancaman Bencana Pesisir Utara Kota Semarang

Untuk melengkapi gambaran krisis ekologis yang telah diuraikan, bagian ini menyajikan data spasial resmi yang dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang. Data ini bersumber dari dokumen Updating Peta Risiko Bencana dan SEMARISK Tahun 2025 serta Kajian Risiko Bencana Kota Semarang Tahun 2023–2027, yang disusun berdasarkan Modul Teknis Kajian Risiko Bencana BNPB (2019), data kejadian bencana, survei lapangan, serta Peta Rupabumi Indonesia skala 1:25.000 dari Badan Informasi Geospasial (BIG). Penyajian peta-peta ini penting karena memberikan validasi visual dan spasial atas tingkat kerentanan wilayah pesisir utara yang menjadi lokus penelitian, sekaligus memperkuat alasan pemilihan Kecamatan Semarang Utara dan Kecamatan Tugu sebagai fokus kajian.

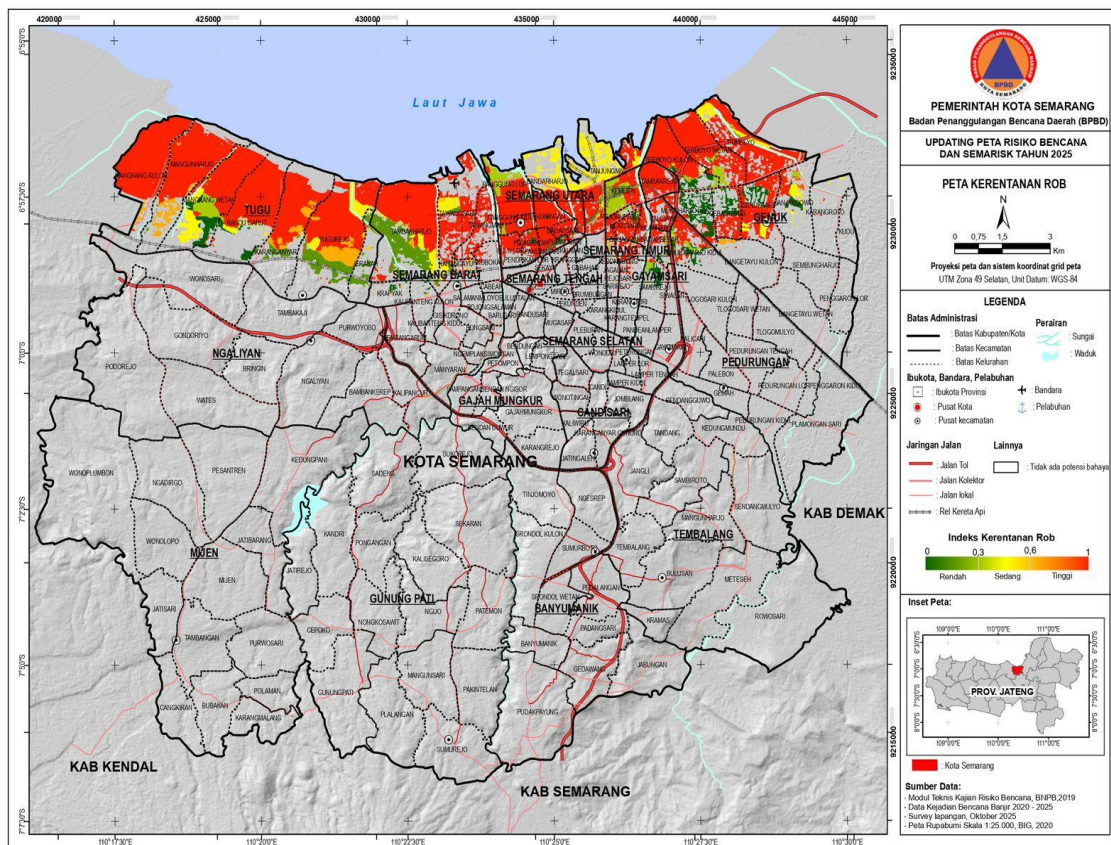
2.4.1 Kerentanan Banjir Rob

Peta Kerentanan Rob yang dikeluarkan BPBD Kota Semarang memperlihatkan bahwa hampir seluruh wilayah pesisir utara berada pada indeks kerentanan tinggi, yang ditandai dengan warna merah pada rentang indeks mendekati nilai 1. Wilayah dengan kerentanan tertinggi tersebar secara konsisten di sepanjang garis pantai utara, meliputi Kecamatan Tugu (Mangkang Kulon, Mangkang Wetan, dan Mangunharjo), Kecamatan Semarang Utara (Tanjung Mas, Bandarharjo, dan Tambakrejo), serta Kecamatan Genuk (Trimulyo dan Terboyo Wetan). Sebaran ini menegaskan bahwa kerentanan rob bukan fenomena yang terisolasi pada satu titik, melainkan persoalan struktural yang melanda keseluruhan bentang pesisir utara kota.

Yang penting dicatat, ketiga wilayah yang menjadi lokus utama penelitian ini, yaitu Tambaklorok dan Tambakrejo di Kelurahan Tanjung Mas serta Mangkang Wetan dan Mangunharjo di Kecamatan Tugu, seluruhnya tergolong dalam kategori kerentanan

tinggi. Hal ini sejalan dengan temuan demografis pada sub-bab sebelumnya, di mana kelompok masyarakat di wilayah-wilayah tersebut memiliki keterbatasan ekonomi yang membatasi kemampuan adaptasi mandiri terhadap ancaman rob.

Gambar 2. 1 Kerentanan Rob Kota Semarang



Sumber: BPBD Kota Semarang, *Updating Peta Risiko Bencana dan SEMARISK Tahun 2025*.

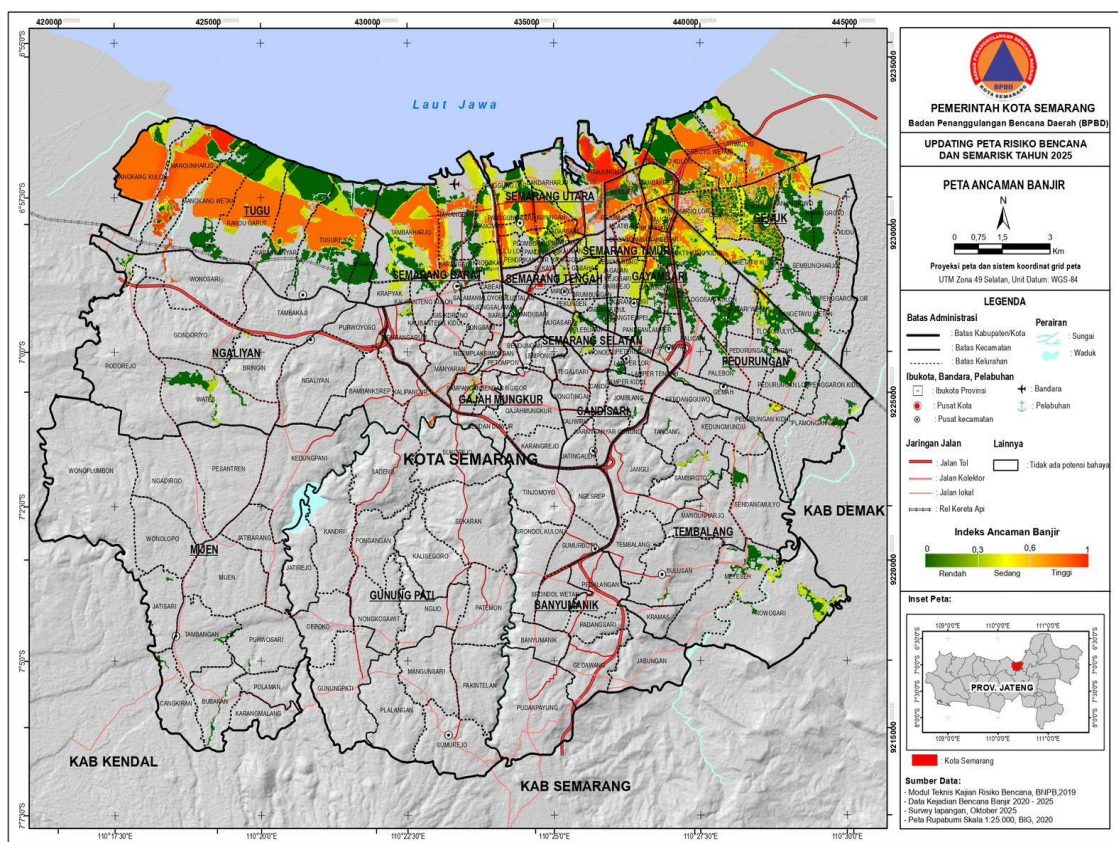
2.4.2 Ancaman Banjir

Peta Ancaman Banjir memperlihatkan pola sebaran yang lebih luas dibandingkan peta kerentanan rob, karena banjir di Kota Semarang tidak hanya bersumber dari pasang air laut, tetapi juga dari limpasan air permukaan dan air kiriman dari hulu. Indeks ancaman banjir tinggi (warna oranye hingga merah) terkonsentrasi di kawasan pesisir utara dan wilayah dataran rendah Semarang bagian tengah-timur, khususnya di Kecamatan Semarang Utara, Genuk, Gayamsari, dan sebagian Pedurungan. Pola sebaran ini memperkuat penjelasan pada sub-bab 2.3 bahwa banjir di Semarang merupakan

persoalan hidrologis berlapis yang mengombinasikan banjir rob, banjir hujan lokal, dan banjir kiriman dari hulu.

Kawasan pesisir utara yang menjadi lokus penelitian kembali tampak sebagai wilayah dengan tingkat ancaman tinggi. Tumpang tindih antara kerentanan rob dan ancaman banjir di wilayah ini menjadikannya zona dengan akumulasi risiko bencana hidrologis yang paling berat di Kota Semarang.

Gambar 2. 2 Peta Ancaman Banjir Kota Semarang



Sumber: BPBD Kota Semarang, Updating Peta Risiko Bencana dan SEMARISK Tahun 2025.

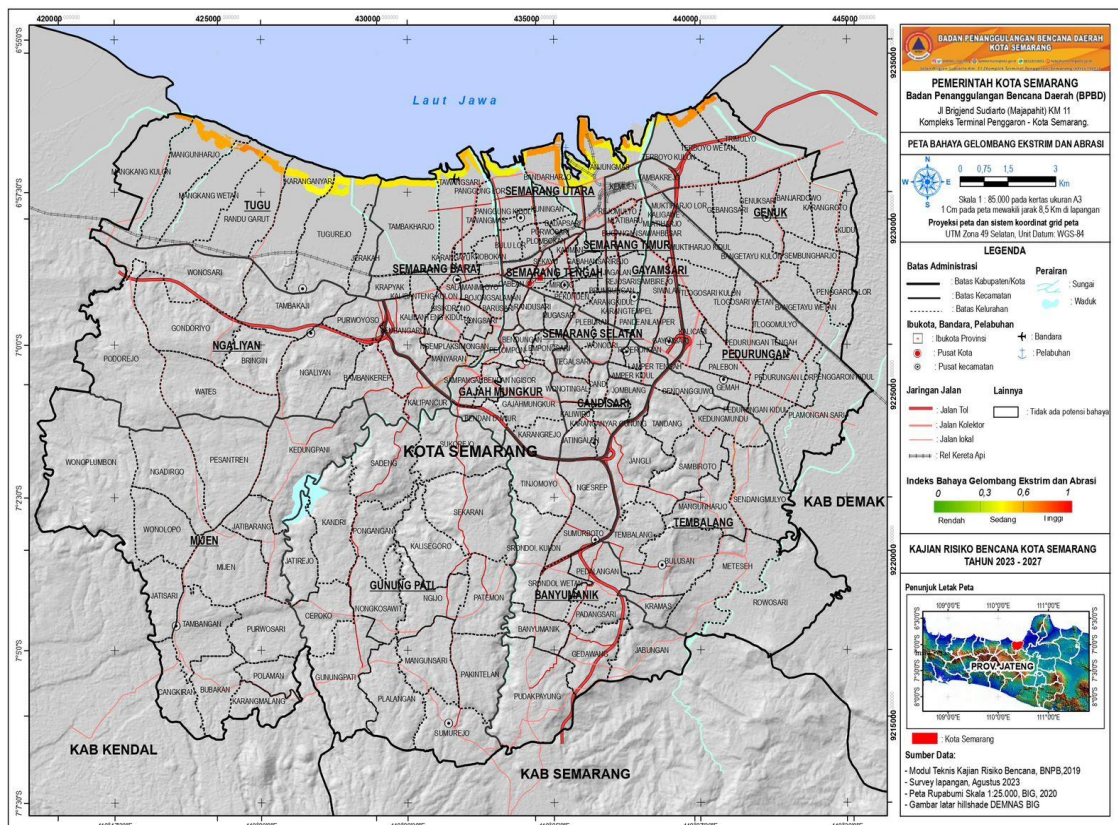
2.4.3 Bahaya Gelombang Ekstrem dan Abrasi

Peta Bahaya Gelombang Ekstrem dan Abrasi memperlihatkan bahwa ancaman ini bersifat khas pesisir, yaitu terkonsentrasi secara linier di sepanjang garis pantai yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Indeks bahaya sedang hingga tinggi (warna

kuning hingga oranye) membentang di sepanjang bibir pantai mulai dari Kecamatan Tugu di sisi barat, melewati Kecamatan Semarang Utara, hingga Kecamatan Genuk di sisi timur. Pola linier ini konsisten dengan karakteristik abrasi sebagaimana dijelaskan pada sub-bab 2.3, yaitu proses pengikisan garis pantai yang dipengaruhi oleh arus laut dan diperparah oleh keberadaan bangunan yang menjorok ke laut.

Wilayah Kecamatan Tugu, termasuk Mangkang Wetan dan Mangunharjo yang menjadi lokus penelitian, tampak berada pada jalur bahaya gelombang ekstrem dan abrasi ini. Temuan spasial ini selaras dengan pengalaman empiris warga setempat yang telah merasakan dampak abrasi sejak dekade 1990-an, sehingga mendorong tumbuhnya inisiatif penanaman mangrove sebagai upaya adaptasi berbasis komunitas, sebagaimana dibahas lebih lanjut pada Bab 3.

Gambar 2. 3 Peta Bahaya Gelombang Ekstrem dan Abrasi Kota Semarang



Sumber: BPBD Kota Semarang, Kajian Risiko Bencana Kota Semarang Tahun 2023–2027.

Ketiga peta di atas secara konsisten menunjukkan bahwa kawasan pesisir utara Kota Semarang, khususnya Kecamatan Semarang Utara, Tugu, dan Genuk, merupakan zona dengan akumulasi risiko bencana tertinggi di Kota Semarang. Ketiga jenis ancaman, yaitu rob, banjir, serta gelombang ekstrem dan abrasi, saling tumpang tindih pada wilayah yang sama, sehingga memperkuat argumen bahwa krisis pesisir di wilayah ini bersifat multidimensional dan saling mengunci sebagaimana kerangka rantai krisis sosial-ekologis yang telah diuraikan. Konvergensi antara data spasial resmi BPBD, data demografis, dan kerangka krisis sosial-ekologis ini menegaskan bahwa pemilihan Tambaklorok, Tambakrejo, Mangkang Wetan, dan Mangunharjo sebagai lokus penelitian memiliki dasar empiris yang kuat, baik dari sisi tingkat kerentanan maupun relevansinya untuk memahami dinamika advokasi adaptasi krisis pesisir.

2.5 Profil Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jawa Tengah

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) merupakan organisasi gerakan lingkungan hidup terbesar di Indonesia. Secara nasional, WALHI beranggotakan 487 organisasi dari unsur organisasi non-pemerintah dan organisasi pecinta alam, serta 203 anggota individu yang tersebar di 28 provinsi. Sejak tahun 1980 hingga saat ini, WALHI secara aktif mendorong upaya penyelamatan dan pemulihan lingkungan hidup di Indonesia, dengan tujuan mewujudkan pengakuan hak atas lingkungan hidup serta perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia sebagai bentuk tanggung jawab negara atas pemenuhan sumber-sumber kehidupan rakyat.

WALHI Jawa Tengah merupakan salah satu eksekutif daerah WALHI yang menjalankan mandat organisasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Dalam konteks pesisir utara, WALHI Jawa Tengah memusatkan kerja advokasinya pada sejumlah isu strategis, yaitu krisis pesisir akibat banjir rob dan penurunan muka tanah, ancaman reklamasi, isu pengungsi iklim dan tanah musnah, serta penolakan terhadap proyek infrastruktur yang dinilai memperparah kerentanan ekologis seperti Tol Tanggul Laut Semarang–Demak dan wacana Giant Sea Wall. Selain isu pesisir, ruang kerja WALHI Jawa Tengah juga mencakup isu energi, pertambangan, dan persoalan perkotaan (urban).

Keterlibatan WALHI Jawa Tengah dalam isu pesisir utara Semarang berlangsung secara konsisten dan intensif, dengan salah satu titik masuk yang signifikan adalah pendampingan komunitas nelayan Tambakrejo pasca-penggusuran pada 2019. Sejak saat itu, WALHI Jawa Tengah aktif menjalankan kerja advokasi yang mencakup produksi pengetahuan alternatif, pendampingan komunitas, pemberdayaan ekonomi, hingga kampanye publik, baik secara mandiri maupun melalui jejaring lintas organisasi seperti Koalisi Maleh Dadi Segoro.

2.5.1 Visi dan Misi

Visi: Terwujudnya suatu tatanan sosial, ekonomi, dan politik yang adil dan demokratis yang dapat menjamin hak-hak rakyat atas sumber-sumber kehidupan dan lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan.

Misi:

1. Mengembangkan potensi kekuatan dan ketahanan rakyat.
2. Mengembalikan mandat negara untuk menegakkan dan melindungi kedaulatan rakyat.
3. Mendekonstruksi tatanan ekonomi kapitalistik global yang menindas dan eksploitatif menuju ke arah ekonomi kerakyatan.
4. Membangun alternatif tata ekonomi dunia baru.
5. Mendesakkan kebijakan pengelolaan sumber-sumber kehidupan rakyat yang adil dan berkelanjutan.

2.5.2 Nilai-nilai Dasar Organisasi

WALHI berpijak pada delapan nilai dasar, yaitu (1) menghormati hak asasi manusia; (2) demokratis, melalui pelibatan aktif rakyat dalam pengambilan keputusan kolektif; (3) keadilan gender, yang menjamin hak yang setara tanpa membedakan jenis kelamin, agama, dan status sosial; (4) keadilan ekologis, yang menekankan akses masyarakat atas manfaat sumber daya serta pengakuan terhadap keragaman cara masyarakat mengelola alam; (5) keadilan antargenerasi, yang menjamin hak generasi sekarang dan mendatang atas lingkungan yang sehat; (6) persaudaraan sosial, melalui

kebersamaan dan solidaritas dalam kerja-kerja sosial; (7) anti-kekerasan, yang menolak segala bentuk kekerasan oleh individu, kelompok, modal, maupun negara; dan (8) keberagaman, yang mengakui kesederajatan manusia dalam kemajemukan.

2.5.3 Prinsip-prinsip Organisasi

Dalam menjalankan kerjanya, WALHI berpegang pada lima prinsip organisasi, yaitu (1) keterbukaan, dengan menyampaikan informasi yang benar mengenai pengelolaan organisasi, program, dan hasil audit keuangan kepada pihak terkait; (2) keswadayaan, dengan mendukung kemandirian politik dan ekonomi masyarakat; (3) profesional, dengan bekerja secara efektif, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan demi kepentingan rakyat; (4) keteladanan, dengan memimpin rakyat melalui tindakan yang menginspirasi; dan (5) kesukarelawanan, dengan tidak menjadikan imbalan atau kekuasaan sebagai tujuan, melainkan semata untuk pemberdayaan dan kemandirian rakyat serta jejaring.

2.5.4 Struktur Organisasi WALHI Jawa Tengah

WALHI memiliki struktur organisasi yang dirancang untuk menjamin akuntabilitas dan partisipasi. Organ tertinggi dalam organisasi adalah Pertemuan Forum Daerah (Forda) yang menentukan arah kebijakan strategis. Secara operasional, WALHI Jawa Tengah dikelola oleh Eksekutif Daerah (ED) yang dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif beserta jajarannya, termasuk Deputy Direktur, dan diawasi oleh Dewan Daerah (DD). Struktur organisasi WALHI Jawa Tengah terdiri dari beberapa organ penting sebagai berikut:

1. Lembaga Anggota, yang terdiri dari organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang lingkungan dan kemasyarakatan.
2. Dewan Daerah, yang bertugas memberikan arahan kebijakan dan melakukan pengawasan terhadap kinerja Eksekutif Daerah.
3. Eksekutif Daerah, yang merupakan pelaksana harian program kerja organisasi, termasuk tim kampanye, tim kajian dan pengelolaan pengetahuan, serta tim pendampingan hukum.

4. Majelis Etik, yang berfungsi menyelesaikan persoalan etik dan menjaga kepatuhan terhadap konstitusi organisasi.

WALHI Jawa Tengah memiliki struktur organisasi yang dirancang untuk menjamin akuntabilitas dan partisipasi efektivitas organisasi sebagai berikut :

1. Direktur
2. Deputy Direktur
3. Administrasi dan Keuangan
4. Kajian dan Pengelolaan pengetahuan
5. Advokasi dan Pengorganisasian
6. Media dan Kampanye

Dalam konteks penelitian ini, dua organ di lingkungan Eksekutif Daerah menjadi narasumber utama, yaitu Deputy Direktur dan Staf Kajian dan Pengelolaan Pengetahuan, yang secara langsung terlibat dalam perumusan dan pelaksanaan strategi advokasi pesisir.